

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1.1 (Heterogenitas Infroman Penelitian).....	34
Bagan 3.1 (Relasi Antara Pekerja dan Pemohon).....	59
Gambar 3.2 (Laporan Pemohon di Lapor.go.id).....	80
Bagan 5.1 (Kerangka Berpikir Penelitian).....	126

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang praktik seksis di ruang pelayanan publik Surabaya, yang terwujud melalui praktik bahasa seksis. Praktik seksis direproduksi menjadi permasalahan yang melibatkan pekerja dalam struktur otoritas di ruang pelayanan publik. Melalui konstruksi bahasa yang bias gender berpengaruh akan adanya perbedaan sikap antara laki-laki dan perempuan di ruang publik. Pekerja menunjukkan upaya pendisiplinan terhadap pekerja lainnya atau pemohon baik laki-laki maupun perempuan. Bagaimana tata cara laki-laki dan perempuan dalam bertutur, berpakaian, bersikap dan berperilaku di ruang publik.

Hasil pengamatan peneliti, praktik seksis melekat pada konstruksi identitas dan kelas seperti gender, ras, etnis, agama, kelas dan status sosial ekonomi. Melalui sistem regulasi pelayanan yang mengacu pada kebijakan pembangunan nasional yang bias gender, instansi pelayanan berusaha menciptakan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Namun, pada praktiknya pekerja dalam pelayanan seringkali melakukan penilaian terhadap pekerja lain maupun pemohon dengan standar yang bias. Praktik seksis dilakukan oleh pekerja secara verbal maupun non verbal. Secara verbal, pekerja mengobjektifikasi tubuh maupun tindakan laki-laki dan perempuan di ruang publik. Kemudian secara non verbal, pekerja menggunakan kekuasaannya dalam proses pelayanan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Praktik seksis yang dilakukan di tempat kerja menunjukkan stereotip gender masih melekat di masyarakat. Hal tersebut dapat berimplikasi pada relasi antara laki-laki dan perempuan di ruang publik.

Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada tahun 2010 dengan didukung data *Women In Leadership Indonesia Baseline Study* tahun 2012 mengenai gambaran umum tentang stereotip gender di

dunia kerja. Menjelaskan persentase segregasi pekerjaan berdasarkan gender, yaitu sekitar 63% laki-laki hanya bekerja dengan laki-laki lain, 56% perempuan hanya atau terutama bekerja dengan perempuan lain, 97% laki-laki memiliki supervisor laki-laki, dan 57% perempuan memiliki supervisor laki-laki. Pemisahan berbasis gender dalam tempat kerja memungkinkan perempuan mengalami berbagai upaya atau tindakan yang diskriminatif. Rendahnya status perempuan di tempat kerja meningkatkan resiko pelecehan verbal dan seksual, menurut hasil penelitian di atas terjadi pelecehan verbal di tempat kerja sekitar 41% dialami oleh perempuan dan 31% dialami oleh laki-laki, sedangkan pelecehan seksual sebagian besar dialami oleh perempuan dengan persentase sebesar 24% dan laki-laki sebesar 9% (Sakernas, 2010).

Kajian Sociolinguistik memandang bahasa sebagai simbol representasi perilaku kehidupan masing-masing individu. Praktik bahasa seksis menunjukkan adanya perbedaan gender yang dibentuk oleh proses sosialisasi yang dikonstruksi dan semakin dilegitimasi melalui ajaran agama atau negara (Fakih, 1996:9). Konstruksi secara sosial maupun kultural dapat mengacu pada ideologi seksisme, yaitu paham yang menempatkan posisi laki-laki lebih superior dan perempuan pada posisi inferior. Menurut Thomas dan Wareing (2007:106), bahasa seksis merupakan bahasa yang menempatkan salah satu jenis kelamin tertentu lebih rendah posisinya, seperti nilai kemanusiaan beserta hak-haknya yang terbatas daripada jenis kelamin yang lain (Arista, 2017).

Praktik seksis yang menempatkan salah satu jenis kelamin tertentu lebih tinggi daripada yang lainnya, dapat berimplikasi pada munculnya ketidakadilan gender. Mayoritas pekerja laki-laki lebih diuntungkan di tempat kerja daripada pekerja perempuan. Hal tersebut cenderung memiliki keterkaitan dengan budaya patriarki yang dianggap sebagai pedoman masyarakat. Dimana nilai-nilai tersebut cenderung merugikan perempuan, karena masih adanya stereotip yang memandang konsep gender sama halnya dengan konsep seks/jenis kelamin. Pensifatan laki-laki dan perempuan dilekatkan dengan hal-hal yang kodrati. Sedangkan, konsep gender

seharusnya didefinisikan sebagai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan berdasar pada konstruksi sosial dan kultural (Andriana, 2012). Gender menurut Oakley (1972) dalam *Sex, Gender, and Society* merupakan perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, bukan hasil ketentuan Tuhan/kodrat melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang (Fakih, 1996:71-72).

Sehingga konsep gender bukan bersifat kodrati dan dapat dipertukarkan. Konstruksi yang melahirkan simbol-simbol pensifatan antara laki-laki dan perempuan terkait dengan budaya masyarakat. Demikian, konsep gender mendefinisikan perempuan dengan sifat yang cantik, emosional, dan keibuan. Sedangkan laki-laki dengan sifat yang kuat, rasional dan perkasa (Wulansari, 2013:38-45). Sedangkan, konsep seks/jenis kelamin didefinisikan sebagai pensifatan atas pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dan tidak dapat dipertukarkan. Misalnya laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakala (*kala menjing*) dan memproduksi sperma. Disisi lain perempuan adalah manusia yang memiliki payudara, rahim, vagina dan memproduksi sel telur (Fakih, 1996:8).

Stereotip gender yang dipahami masyarakat lekat dengan jenis kelamin dan bersifat kodrati adalah hasil dari konstruksi budaya. Hal tersebut membuat perempuan dan laki-laki harus bersikap dan berperilaku sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Jika ada perempuan atau laki-laki melakukan tindakan atau berperilaku tidak sesuai dengan proyeksi masyarakat, maka dianggap telah melanggar kodrat dan dinilai sebagai manusia yang memiliki perilaku menyimpang. Hal tersebut dapat berdampak pada hubungan sosial diantara individu tersebut dengan masyarakat.

Stereotip tentang gender seringkali mengobjektivikasi perempuan. Perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan yang sebanding dengan laki-laki, sehingga perempuan ditempatkan pada kelas kedua dalam sistem sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, menggambarkan bahwa praktik bahasa seksis yang muncul di ruang pelayanan publik menyangkut

permasalahan kekuasaan. Terdapat relasi kuasa yang terbentuk melalui sistem pengetahuan yang lebih didasarkan pada wacana gender yang disamakan dengan konsep seks/jenis kelamin, sehingga membentuk standar-standar yang bias gender. Standar-standar bias gender yang memunculkan stereotip pada identitas baik laki-laki atau perempuan terbentuk melalui wacana gender dan jenis kelamin yang memiliki keterkaitan.

Pembentukan identitas laki-laki dan perempuan merupakan hasil konstruksi budaya. Hukum-hukum yang tidak tertulis pada masyarakat dibangun melalui budaya, seperti pada suatu tingkatan produk tubuh manusia yaitu jantan dan betina. Tubuh perempuan direpresi dalam wacana patriarki. Budaya tersebut membangun sistem dan pola pikir masyarakat mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan (Wulansari, 2013:38-45). Stereotip yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan pada dasarnya tidak bersifat alamiah/biologis, melainkan bersifat kultural. Irvine menyatakan bahwa identitas seksual tidaklah bersifat imperatif biologis, tetapi artefak sosial. Dari segi seksual, perempuan dan laki-laki bukanlah selalu makhluk biologis, tetapi lebih sebagai makhluk sosial dan makhluk politik. Jika tubuh bersifat alamiah dan determinis, maka pengalaman atasnya akan bersifat konstan dan universal. Studi tertentu melaporkan bahwa perbedaan gender mempengaruhi imajinasi tentang tubuh/seksualitas (Elya, 2009).

Praktik seksis yang mengacu pada paham seksisme secara historis bermula saat terjadi Gerakan Pembebasan Perempuan (*Women's Liberation Movement*) pada tahun 1960. Saat itu, para penganut teori feminis menyebutkan tekanan terhadap perempuan telah menyebar dan terjadi di hampir seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka mulai bersuara lebih lantang tentang paham seksisme. Paham seksisme merujuk pada perilaku kolektif yang merefleksikan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Isu seksisme dalam bahasa sejak tahun 1960-an telah menjadi perdebatan kaum feminis. Perubahan bahasa yang mendiskriminasi perempuan dan merendahkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perempuan menjadi perhatian aktifis feminis (Salama, 2013).

Bahasa sebagai hasil manifestasi dari kebudayaan memberikan gambaran tentang kondisi sosial, sistem nilai, perilaku budaya, serta aspek hubungan sosial suatu masyarakat. Termasuk berbagai isu yang muncul karena adanya perbedaan relasi sosial yang bertumpu pada jenis kelamin. Bahasa mampu merefleksikan pola hubungan sosial dengan cerminan diferensiasi gender didalamnya. Dalam konteks tersebut, bahasa memuat istilah-istilah, konsep-konsep, ataupun label-label terkait dengan benda-benda, perilaku, sistem nilai dan lain sebagainya. Bahasa merefleksikan pandangan dan penilaian masyarakat atas standar mana yang pantas bagi laki-laki dan perempuan dalam berperilaku. Selama ini muncul stereotip dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan termasuk bahasa, laki-laki mendapatkan tempat yang lebih diuntungkan, dan perempuan cenderung dirugikan (Jalal, 2009).

Bahasa sebagai gejala sosial yang berhubungan erat dengan sikap sosial dijadikan media atau alat untuk melakukan komunikasi dalam interaksi sosial. Secara sosial, laki-laki dan perempuan berbeda karena masyarakat menentukan peran sosial yang berbeda untuk mereka, serta mengharapkan pola tingkah laku yang berbeda pula. Hal tersebut memunculkan diskriminasi bahasa yang digunakan antara perempuan dan laki-laki terikat dengan relasi kuasa dan status sosial. Dalam berkomunikasi masing-masing individu menunjukkan unsur kekuasaan dan status sosial yang memiliki peran penting. Menentukan struktur hierarki laki-laki yang cenderung lebih berkuasa daripada perempuan. Bahasa merupakan implikasi dari asumsi-asumsi yang diyakini masyarakat tentang bagaimana laki-laki maupun perempuan harus berperilaku melalui refleksi dari hubungan sosial dan budaya dalam masyarakat. Bias gender dalam bahasa dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, peran sosial, dan budaya (Jalal, 2009). Polarisasi gender menunjukkan bahwa perempuan dianggap berstatus inferior dan laki-laki berstatus superior.

Salah satu karya yang menjadi inspirasi bagi para pakar Sociolinguistik untuk meneliti lebih lanjut tentang bahasa laki-laki dan perempuan yaitu

karya Robin Lakoff (pakar Sosiolinguistik) pada tahun 1975 yang berjudul "*Language and Woman's Place*". Menurut Lakoff, perempuan mengalami diskriminasi bahasa dalam dua hal. Pertama, dalam hal bagaimana mereka diajar untuk berbahasa. Kedua, dalam hal bagaimana bahasa pada umumnya memperlakukan mereka. Diskriminasi praktik bahasa antara perempuan dan laki-laki muncul karena stereotip gender yang lekat dalam relasi kuasa dan status sosial. Menurut Cheri Kramarae bahasa seksis merupakan media untuk meningkatkan derajat laki-laki dan mengesampingkan, menyepelkan atau menghina perempuan dengan penyusunan kosa kata yang terstruktur (Budiman, 1992).

Menurut Mills dalam bukunya yang bertajuk *Language and Sexism* pada tahun 2008, seksisme sama halnya dengan rasisme. Sebagai bentuk diskriminasi bahasa lainnya yang terbentuk karena tekanan masyarakat yang lebih besar. Ketidakadilan institusi akan kekuasaan pada akhirnya akan menimbulkan konflik, terhadap siapa yang mempunyai hak untuk menguasai posisi dan sumber daya tertentu. Seksisme terjadi dalam konflik antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam *public sphere*/ruang publik (Kurniasari, 2007). Sara Mills berargumen bahwa praktik bahasa pun dapat menunjukkan sikap seksisme. Alih-alih memandang bahasa sebagai alat yang netral, Mills berpendapat bahasa dapat digunakan secara strategis oleh aktor yang seksis maupun mereka yang peduli terhadap isu perempuan (Mills, 2008).

Seksisme termasuk sebagai prasangka dan/atau diskriminasi terhadap seseorang yang bergantung terhadap seks, tetapi juga dapat merujuk pada semua sistem diferensiasi pada seks individu. Menurut Graddol dan Swann seksisme memperlihatkan adanya ketidakadilan atas perlakuan terhadap jenis kelamin tertentu, laki-laki terhadap perempuan atau sesamanya. Pada umumnya, yang menjadi korban ketidakadilan adalah perempuan. Seksisme merujuk pada diskriminasi yang diekspresikan melalui tindakan, perkataan, maupun hanya berbentuk kepercayaan/keyakinan (Nababan, 2004:156; Netra, 2009). Persing memandang seksisme sebagai bentuk ketidaksetaraan

laki-laki dan perempuan yang pada dasarnya tidak hanya terjadi dalam berbagai aktivitas kehidupan, namun diwujudkan melalui bahasa baik secara verbal (bahasa) maupun non-verbal (gestur). Seksisme yang diekspresikan melalui perkataan dapat disebut sebagai bahasa seksis (Nababan, 2004:156; Netra, 2009).

Praktik bahasa seksis dalam dunia kerja dapat menimbulkan terjadinya diskriminasi antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Ketimpangan perlakuan yang diterima oleh para pekerja perempuan karena sikap seksis akibat pengaruh stereotip gender, seperti perempuan tidak bisa mengerjakan sejumlah hal yang dilakukan oleh laki-laki. Dalam studi yang dilakukan oleh Macnell et. al. pada tahun 2015 ditemukan fakta bahwa pelajar yang mencari pengajar kelas online memberi penilaian lebih tinggi kepada pengajar yang mencantumkan identitas gender laki-laki daripada perempuan, terlepas dari gender sesungguhnya pengajar tersebut. Dilansir dari *International Labour Organization* (ILO), selain perbedaan level edukasi atau umur, penilaian perempuan di bawah laki-laki di tempat kerja, tanggung jawab perempuan di luar kantor, serta praktik diskriminasi berpartisipasi menciptakan kesenjangan. Jika hal ini terus berlangsung, dibutuhkan 70 tahun untuk menutup kesenjangan upah berbasis gender (tirto.id, 2017).

Kebijakan anti-diskriminasi upah termuat dalam pasal 1 Undang-Undang NO. 80 Tahun 1957 yang menjelaskan pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan yang sama nilainya merujuk pada nilai pengupahan yang diadakan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Namun pada penerapannya kesenjangan pengupahan antara pekerja laki-laki dan perempuan tetap ada. Menurut BPS Keadaan Angkatan Kerja Indonesia yang memperlihatkan rata-rata upah bersih yang diperoleh pekerja baik dari sektor pertanian maupun non-pertanian cenderung bersifat diskriminatif meskipun standar upah minimum selalu naik, tetapi rata-rata upah yang diterima oleh pekerja perempuan lebih rendah daripada pekerja laki-laki. Kesenjangan pemberian upah tersebut pada tahun 2019, rata-rata upah buruh nasional sebesar 2,91 juta rupiah per bulan. Upah buruh laki-laki

sebesar 3,17 rupiah, sedangkan perempuan sebesar 2,45 juta rupiah (BPS,2019). Hal tersebut menggambarkan bahwa peran perempuan dalam dunia kerja masih belum diperhitungkan, karena rata-rata upah buruh perempuan masih dibawah rata-rata upah buruh nasional dibandingkan upah buruh laki-laki yang jauh lebih tinggi.

Peraturan tertulis tentang diskriminasi di tempat kerja disebutkan di dalam Konvensi ILO tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No.111), yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1999. Konvensi tersebut melarang diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, asal-usul kebangsaan dan asal-usul sosial. Menurut ILO diskriminasi meliputi perbedaan perlakuan, pengecualian kesempatan, pengutamaan/preferensi yang diberikan. ILO menggambarkan diskriminasi gender dapat berwujud: **Pertama**, diskriminasi langsung yang mengacu pada situasi perlakuan yang berbeda terhadap pelamar pekerjaan atau karyawan yang dibuat eksplisit bertumpu pada dasar-dasar yang termuat dalam undang-undang atau konvensi. **Kedua**, diskriminasi tidak langsung mengacu apabila peraturan dan praktik tampak netral tetapi praktiknya berakibat pada kerugian dari satu jenis kelamin. **Ketiga**, diskriminasi secara hukum (*de jure*) mengacu pada undang-undang atau peraturan yang memperlakukan salah satu jenis kelamin secara berbeda. **Keempat**, diskriminasi secara praktik (*de facto*) mengacu pada perbedaan faktual dalam kesempatan dan perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin di pasar kerja atau dalam praktik sumber daya manusia perusahaan (ILO, 2006).

Pelecehan juga menjadi salah satu bentuk diskriminasi yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin, termaktub dalam undang-undang dan konvensi ILO No 111. Menjelaskan pelecehan terdiri dari perilaku atau komentar yang tidak diinginkan yang melanggar martabat orang lain dan/atau menciptakan sebuah lingkungan kerja yang mengintimidasi, tidak ramah, merendahkan atau menyinggung. Pelecehan dilakukan secara verbal atau non-verbal/fisik seperti gurauan yang merendahkan, mengintimidasi seseorang atas dasar gender, memberi perhatian seksual yang tidak diinginkan orang lain (ILO,

2006). Menurut *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), bentuk-bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi gender antara lain: pemarginalan posisi dan peran perempuan, subordinasi (perempuan ada di bawah pria), stereotip-stereotip, kekerasan dalam berbagai bentuk, dan beban ganda dalam rumah tangga. Pada akhirnya akibat-akibat dari diskriminasi gender inilah yang bisa dikatakan menjadi masalah pokok untuk mencapai tujuan kesetaraan gender di ruang publik (Komnasperempuan.go.id, 2011).

Menurut Badan Pusat Statistik Keadaan Angkatan Kerja Tahun 2019 memaparkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan cenderung stagnan dari tahun 2015-2019. TPAK laki-laki pada tahun 2015 sebesar 82,71 persen, tidak mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2019 sebesar 83,13 persen. Sedangkan, TPAK perempuan pada tahun 2015 sebesar 48,87 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 51,89 persen. Jika melihat tingkat pertumbuhan TPAK dalam kurun waktu terakhir yaitu periode Agustus 2018-2019, pertumbuhan TPAK perempuan sebesar 0,01 persen lebih lambat dari pertumbuhan TPAK laki-laki sebesar 0,44 persen (BPS, 2019).

Rendahnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja dijelaskan dalam *“Women Career Advancement in Public Service: A Study in Indonesia”* pada tahun 2012 yaitu perempuan cenderung memilih untuk tetap dekat dengan rumah karena alasan tanggung jawab keluarga. Perempuan juga cenderung menolak pekerjaan jika pekerjaan tersebut menjauhkan mereka dari pekerjaan rumah (Azmi et al, 2012). Pentingnya peran perempuan dalam berkontribusi untuk peningkatan pendapatan negara, telah diakui oleh negara sebagaimana yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Namun, dalam praktiknya partisipasi perempuan dalam pekerjaan tidak terlepas dengan pekerjaan domestik.

Menurut BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Statistik Gender Tematik: *Potret Ketimpangan*

Gender dalam Ekonomi menjelaskan bahwa perempuan di Indonesia masih memiliki peluang yang terbatas untuk mendapatkan penghasilan tinggi daripada laki-laki. Perempuan dalam angkatan kerja sebagian besar berada di sektor pertanian dan perdagangan memiliki kerentanan dengan status pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Perempuan dalam sektor pekerjaan dilekatkan dengan fisik lemah dan tidak memiliki keahlian, sehingga identik dengan pekerjaan yang mengandalkan keterampilan seperti di bidang pelayanan atau komunikasi. Contohnya pedagang, pramuniaga, pramusaji, tenaga pendidik, tenaga kesehatan/perawat dan profesi yang berhubungan dengan jasa. Sedangkan laki-laki dilekatkan dengan faktor biologis yang kuat, psikologis dan sosial. Contohnya dalam bidang konstruksi, transportasi, pertambangan dan penggalian (Said et al, 2016).

Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada tahun 2010 dengan didukung data *Women In Leadership Indonesia Baseline Study* tahun 2012 mengenai gambaran umum tentang stereotip gender di dunia kerja. Survei yang melibatkan 1000 partisipan di Jawa Timur dan Sumatera Utara, menjelaskan bahwa ikatan angkatan kerja yang lemah hanya membawa kerugian terutama bagi pekerja perempuan. Menurut hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa laki-laki memiliki masa kerja yang lebih panjang daripada perempuan yaitu sekitar 9,4 tahun dan 5,6 tahun untuk pekerja perempuan. Pekerja laki-laki memiliki peluang sebesar 24% untuk promosi jabatan dari pada pekerja perempuan sebesar 17%. Diskriminasi yang dialami perempuan di tempat kerja juga berlanjut pada pemberian tunjangan seperti jamsostek (laki-laki 28% dan perempuan 18%), tunjangan kepala keluarga yang tersedia (laki-laki 24% dan perempuan 6%), dan tunjangan kepala keluarga yang diterima (laki-laki 53% dan perempuan 22%) (Sakernas, 2010).

Seksisme yang ambivalen mencerminkan seksisme yang diwarnai perasaan negatif dan kekecewaan terhadap perempuan, maupun seksisme yang diwarnai dengan afeksi, rasa hormat, dan kagum secara bersamaan. Individu dalam masyarakat yang tidak mengakui adanya kesetaraan gender

dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi dan politik cenderung menunjukkan seksisme ambivalen yang tinggi. Ketidakadilan gender pada lingkungan kerja yang mendiskriminasi pekerja perempuan dalam pemberian tugas, gaji, atau promosi jabatan. Praktik seksis yang berlebihan dapat berimplikasi pada kekerasan seksual, pemerkosaan, dan berbagai bentuk pelecehan seksual (Salama, 2013).

Dominasi gender dalam sektor pekerjaan tertentu menunjukkan segregasi dalam pekerjaan yang memiliki konsekuensi pada pembatasan potensi perempuan. Stereotip masyarakat terhadap pembagian kerja secara seksual mempengaruhi keberlangsungan ketidakadilan gender yang berujung pada lahirnya diskriminasi. Dalam *“Women’s Leadership in Indonesia: Current Discussion, Barriers, and Existing Stigma”* pada tahun 2016 menjelaskan bahwa segregasi pekerjaan dapat disebabkan oleh melekatnya konsep kodrat bagi perempuan untuk memelihara, mengasuh, dan melakukan pekerjaan domestik. Ketika perempuan melakukan dominasi di lingkungan pekerjaan memiliki keterkaitan dengan hal-hal domestik. Menurut Leiter dan Richaud, menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap karyawan di lingkungan kerja baik yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau rekan kerja dapat berdampak pada menurunnya moral karyawan, kurangnya semangat kerja dan produktivitas karyawan menurun (Andjani et al, 2016).

Hasil penelitian Sosiologi menjelaskan bahwa perempuan pada umumnya lebih sadar kedudukannya dibandingkan laki-laki, sehingga perempuan dianggap lebih peka terhadap faktor penggunaan bahasa yang dihubungkan dengan kelas sosial. Kecakapan pekerja laki-laki dalam bertutur kata mempunyai konotasi pada kejantanan dan lebih menyukai bentuk bahasa yang tidak baku (menyimpang dari yang baik) daripada perempuan. Hal tersebut dikarenakan tutur kata kelas pekerja dihubungkan dengan ‘kekerasan’ yang biasanya menjadi ciri kehidupan kelas pekerja, dan kekerasan itu dianggap sebagai pertanda kejantanan. Menurut para ahli Sociolinguistik, perempuan dianggap lebih teliti dan selaras dengan norma-norma masyarakat. Perempuan yang cenderung terbuka membuat laki-laki

sulit dalam menyesuaikan dirinya dalam berbahasa. Perempuan dinilai lebih senang berbicara ketika membahas topik yang sesuai. Ucapan perempuan penuh dengan gosip, sering dikurangi atau ditambahi, tidak masuk akal/tidak logis, kurang akurat atau faktor pendidikan, dan sering bergaya. Beberapa pandangan bahwa gender berpengaruh pada bentuk kebahasaan antara lain bahwa perempuan biasanya gemuk, tidak berotot, kurang memiliki tenaga, kurang bisa menimbang, pikiran yang cepat dewasa dan mampu hidup lebih lama (Wibowo, 2010).

Praktik bahasa seksis mayoritas dilakukan oleh laki-laki untuk mempertahankan dominasinya dalam masyarakat. Secara sengaja membuat perbedaan antara bahasa laki-laki dan perempuan. Bahasa sebagai konstruksi sosial budaya masyarakat setempat terwujud melalui konsensus, membentuk cara pandang terhadap laki-laki dan perempuan. Bahasa diciptakan oleh laki-laki, seringkali membentuk ekspresi bahasa yang asimetris dan dapat berdampak pada ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan. Dominasi laki-laki dalam struktur sosial masyarakat membuat perempuan dianggap sebagai objek, lemah dan hanya pelengkap belaka. Sehingga dapat dilihat bahwa praktik bahasa seksis memiliki keterkaitan dengan kekuasaan antara relasi laki-laki dan perempuan (Hijriyah, 2014).

Terdapat dua hal yang membentuk perbedaan antara bahasa laki-laki dan perempuan, yaitu: **Pertama**, masalah hubungan sosial. Hubungan pertemanan dan kebiasaan bermain yang sejenis pada masa anak-anak dan kemudian berlanjut sampai persahabatan dewasa akan melahirkan kelompok laki-laki dan perempuan mempunyai sub-budaya masing-masing, yang mempunyai pola-pola dan gaya bahasa yang sesuai dengan kelompok mereka. Masalah akan timbul apabila keduanya ingin melakukan komunikasi. **Kedua**, berkaitan dengan faktor biologis dan sosialisasi. Seperti anak laki-laki dilarang bermain bunga karena melambangkan hal yang lembut, dan lembut itu identik dengan perempuan. Disisi lain, perempuan dilarang memakai celana, bermain bola, pedang-pedangan, dan permainan yang melibatkan fisik karena itu merupakan permainan khusus anak laki-laki dan jika anak

perempuan tetap bermain, maka akan dijuluki sebagai perempuan tomboy. Sosialisasi standar yang bias menimbulkan perbedaan, anak perempuan sudah mendapatkan proteksi yang ketat sedari kecil dibandingkan anak laki-laki. Apabila ada anak perempuan yang duduk atau berbicara kurang sopan, maka orang tua akan menegur dengan berbagai mitos yang diyakini, tetapi jika anak laki-laki yang berperilaku kurang sopan maka dianggap sebagai anak yang aktif (Munjin, 2008). Sosialisasi dengan standardisasi yang tidak netral dan bias gender dianggap sebagai awal munculnya stereotip perempuan sebagai makhluk kedua di masyarakat setelah laki-laki. Perbedaan tersebut menggambarkan bahwa stereotip melalui bahasa seksis dilakukan secara terstruktur, bermula dari institusi inti yaitu keluarga.

Dalam penelitian ini, praktik seksis di lingkungan kerja bertumpu pada legitimasi wacana gender. Pekerja memproduksi bahasa seksis dengan sumber daya pengetahuan yang dibentuk melalui regulasi/normalisasi di ruang publik. Regulasi yang dirumuskan sebagai bentuk upaya penciptaan pembangunan yang responsif gender, pada praktiknya tak luput dengan pendisiplinan yang bias gender. Relasi antar pekerja dan/atau pemohon memiliki keterkaitan dengan konteks kekuasaan. Ketika pekerja sedang bekerja melakukan pelayanan, di saat itu terjadi interaksi antar individu dan secara bersamaan sedang terjadi relasi kekuasaan. Operasi kekuasaan dalam struktur otoritas tersebut menunjukkan kontestasi wacana. Wacana harus dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan konteks lingkungan sosialnya. Studi ini menggunakan analisis wacana kritis melibatkan konteks dalam lingkup latar, situasi, historis, kekuasaan, dan ideologi (Fauzan, 2014).

Wacana meliputi sekumpulan tanda yang mempunyai makna, sesuai intensitasnya sebagai ungkapan terhadap gejala sosial yang menjadi stimulus terbentuknya teks wacana. Wacana merupakan hasil rekaman dari suatu peristiwa yang terjadi dan diwujudkan dalam sistem bahasa, sehingga teks wacana bisa dikaji melalui analisis wacana kritis (Abadi, 2017). Wacana tersebar melalui relasi kuasa antara berbagai kekuatan dominan dan tidak tergantung pada kesadaran manusia. Kekuasaan sebagai sebuah strategi yang

didalamnya terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Fungsi dari kuasa pada suatu bidang tertentu menandakan kekuasaan menentukan susunan aturan dan hubungan dari dalam yang memungkinkan semuanya terjadi.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengupas praktik seksis yang dilakukan oleh pekerja di ruang pelayanan publik, melalui bahasa yang bias gender sebagai media. Melalui analisis wacana kritis dengan perspektif Michel Foucault bermaksud untuk menemukan penjelasan tentang mengapa praktik seksis terjadi, menelusuri secara mendalam dengan pendekatan genealogi. Analisis wacana kritis melakukan kajian empiris tentang hubungan-hubungan antara wacana dan perkembangan dunia sosial kultural dalam domain-domain sosial yang berbeda. Tujuannya untuk menjelaskan dimensi linguistik kewacanaan yang berdimensi sosial kultural dan proses perubahan dalam modernitas terkini (Abadi, 2017). Studi ini akan mengkaji dimensi bahasa seksis yang berimplikasi pada munculnya praktik seksis yang berakar dari stereotip peran gender dan relasi kuasa yang terjalin dalam eksistensi wacana Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan, terutama di bidang pelayanan publik.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji masalah pokok yang menjadi perhatian dalam peneliti yaitu sebagai berikut: **Bagaimana praktik seksis dilakukan oleh pekerja di ruang pelayanan publik Surabaya melalui konstruksi bahasa yang bias gender?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini berupaya untuk mengungkap praktik seksis yang dilakukan oleh pekerja di ruang pelayanan publik Surabaya, melalui konstruksi bahasa yang bias gender. Mendeskripsikan relasi gender antara pekerja dan/atau pemohon dalam wacana budaya patriarki yang dominan, ditengah adanya wacana kesetaraan gender dalam pembangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui tujuan penelitian diatas, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya tentang studi yang berhubungan dengan topik penelitian ini, baik dari segi teoritik dan metodologi. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam kajian studi Sosiologi Gender dan Sosiologi Linguistik, sekaligus menjadi kontribusi dalam perkembangan teori diskursus atau wacana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam membongkar realitas praktik seksis di ruang pelayanan publik, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi struktur pemerintahan dalam melakukan pelayanan publik sesuai dengan regulasi yang responsif gender.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan menguraikan kajian wacana/diskursus tentang bahasa seksis, dengan memetakan hasil penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi dalam memahami praktik seksis yang dikonstruksi melalui bahasa. Meskipun kajian penelitian terdahulu tidak relevan secara keseluruhan terhadap penelitian ini, namun hasil penelitian tersebut dapat menjadi pendukung dalam merumuskan fokus penelitian. Kemudian dalam bagian ini juga akan menjelaskan secara singkat mengenai substansi pemikiran Foucault dalam membedah wacana, gender, dan bahasa.

1.5.1 Kajian Studi Terdahulu

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh I Made Netra dari Universitas Udayana tentang *“Perilaku Seksis Dalam Bahasa Seni Pertunjukan Ragam Humor Di Kota Denpasar Kajian Bahasa Dan Jender.”* Hasil penelitian menjelaskan bahwa bahasa seksis yang digunakan

dalam humor antara jenis kelamin dengan jenis kelamin tertentu dimaksudkan untuk menjadikan perempuan sebagai objek atau merendahkan, menyepelkan, dan mengesampingkan perempuan yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tidak langsung dengan pengandaian, dan secara langsung antara jenis kelamin tertentu, seperti antara perempuan dengan perempuan, antara laki-laki dengan laki-laki adalah dan antara laki-laki dengan perempuan. Sebaliknya, secara implisit perempuan pun bisa berperilaku seksis di depan kelompoknya sendiri dan terhadap laki-laki sehingga laki-laki tersebut diabaikan, dilecehkan, dan disepelkannya. Penelitian tersebut menggunakan teori bahasa dan gender dari Wolfram (1991) yang menjelaskan tentang variasi bahasa berdasarkan gender merupakan hasil bentukan masyarakat penutur melalui proses sosial dan budaya di suatu tempat, dan kurun waktu tertentu. Metodologi yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan semiotik sosial.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Munjin seorang dosen tetap di Jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Purwokerto tentang "*Ekspresi Bahasa dan Gender: Sebuah Kajian Sociolinguistik.*" Hasil penelitian menjelaskan bahwa ekspresi bahasa mencerminkan kecenderungan penuturnya. Dalam masyarakat Inggris yang bersifat Patriarki, dapat dilihat adanya corak bahasa yang diskriminatif terhadap perempuan. Timbulnya stereotip bahasa terhadap perempuan disebabkan oleh faktor kekuasaan dan dominasi laki-laki atas perempuan diberbagai sektor. Faktor lain adalah masalah perbedaan pergaulan yang sejenis, sehingga menimbulkan sub-kultur atas sub-kultur yang lain, apabila keduanya bertemu dimungkinkan munculnya masalah baru. Pola sosialisasi yang diterapkan pada tiap gender tidak bersifat netral, tak kalah pentingnya membentuk terjadinya perbedaan ini. Berangkat dari faktor-faktor tersebut memunculkan adanya asimetri, istilah tak bertanda, penyempitan dan pemberian arti negatif seperti kata dalam bahasa Inggris. Akibatnya, terbentuklah bahasa yang bersifat seksis. Jika ekspresi bahasa

menggambarkan penuturnya, maka sebenarnya telah terjadi perilaku seksisme dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Inggris. Penelitian ini tidak menjelaskan teori dan metodologi yang digunakan.

Dari dua hasil penelitian diatas, adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaan dari keduanya yaitu topik besar yang mengkaji tentang bahasa dan gender. Perbedaannya studi terdahulu diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu *issue* yang diangkat, jika pada studi terdahulu dijelaskan bahwa perilaku seksis terdapat dalam pertunjukan seni dan implikasinya dengan bahasa seksis yang berdampak pada lahirnya diskriminasi baik oleh perempuan maupun laki-laki. Dan hasil penelitian dari studi terdahulu yang lain menjelaskan bahwa ekspresi bahasa mencerminkan penuturnya, masyarakat Inggris bersifat patriarki. Faktor yang menyebabkan kemunculan bahasa seksis yaitu faktor kekuasaan, masalah perbedaan pergaulan yang menimbulkan sub-kultur yang berbeda, dan masalah sosialisasi yang tidak netral cenderung bias gender. Sedangkan, yang akan dikaji oleh peneliti yaitu berfokus untuk membongkar tentang praktik seksis dalam relasi kuasa di ruang pelayanan publik antara pekerja dan masyarakat, melalui konstruksi bahasa seksis. Melalui panduan dalam studi ini, diharapkan dapat memperoleh data yang baru dengan pembahasan lain yang akan ditinjau dari sisi sosiologis.

1.5.2 Memahami Substansi Pemikiran Foucault

Ada tiga hal yang menjadi dasar pemikiran Foucault dalam memandang suatu realitas yang terjadi dalam masyarakat, yaitu : kekuasaan/*power*, pengetahuan/*knowledge* dan diskursus/*discourse*. Ketiga hal tersebut menjadi fokus dalam karya-karyanya seperti *Madness And Civilization* (1961), *The Order of Things* (1966) dan *Archaeology of Knowledge* (1969) melalui pendekatannya sebagai arkeologi pengetahuan (Satvikadewi, 2014). Dalam karyanya *Madness And Civilization* yang terbit pada tahun 1961, Foucault memuat gagasannya tentang kegilaan yang

terjadi ketika jaman *Humanisme Renaissance*. Gagasan tersebut tidak hanya mengontrol serta memisahkan antara kewarasan dan kegilaan sebagai sebuah diskursus, tetapi juga penaklukan kegilaan oleh yang waras (Ritzer, 2009: 82; Wiradnyana, 2018).

Ada kekuasaan yang mengontrol para penderita kegilaan untuk dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, hal ini menggambarkan penaklukan kegilaan oleh yang waras. Diskursus tersebut disepakati oleh publik bahwa kegilaan merupakan penyakit atau kejahatan yang harus diasingkan dari masyarakat. Pada abad ke-17, Foucault menjelaskan bagaimana negara menjadi tanggungjawab atas kegilaan, kemiskinan, pengangguran yang dianggap sebagai masalah sosial (Wiradyana, 2018). Arkeologi pengetahuan digunakan Foucault untuk melahirkan konsepsi kegilaan bukan sebagai penyakit yang butuh pengobatan, tetapi menuntun pemikiran bahwa kegilaan hanya akan memicu masalah sosial apabila masyarakat mengkonstruksikannya sebagai akibat dari kecacatan moralitas. Sedangkan, konstruksi tersebut dapat berubah sesuai konteks masyarakat yang juga mengalami pergeseran (Satvikadewi, 2014).

Karya Foucault *The Order of Things* memuat tentang tiga domain gagasan epistemologi yang mengatur syarat-syarat pengetahuan, yaitu kehidupan, kerja dan bahasa. Arkeologi atas ilmu pengetahuan mempelajari bagaimana struktur cakupan ilmu pengetahuan membentuk cara berpikir seseorang dalam masyarakat. Perspektif Foucault pada karyanya ini dilatarbelakangi oleh runtuhnya modernitas dan modernisme yang mana muncul kesadaran antoposentrisme (manusia adalah pusat ilmu pengetahuan). Hal tersebut membawa konsekuensi lahirnya sekularisasi antara subjek dan objek pengetahuan, yaitu manusia dan ilmu pengetahuan. Semua pengetahuan memiliki penjelasan yang berpola dan logis pada setiap peristiwa yang terjadi. Sehingga, dimensi logis menganggap manusia sebagai makhluk rasional dalam setiap tindakannya. Sekularisasi tersebut juga memisahkan keterkaitan pengetahuan dan agama. Modernitas ditandai dengan hadirnya sistem negara-bangsa, kapitalisme, dan liberalisme yang

mengakui manusia sebagai subjek yang otonom (Satvikadewi, 2014). Namun disisi lain, antroposentrisme melahirkan asas kebebasan dan hak azasi manusia yang mendorong lahirnya post-modernisme. Munculnya berbagai peristiwa yang tidak bisa dijelaskan oleh paradigma modernisme, dimana peran negara semakin sedikit dan mulai digantikan oleh korporat karena munculnya neo-liberalisme yang mengedepankan pasar. Dengan kata lain, lahir era baru yang bisa menggambarkan realitas kehidupan praktis yaitu pasca-modernitas.

Sebagai pemikir pasca modern, Foucault menjelaskan bahwa kebenaran merupakan hasil konstruksi manusia atas konsepsi kekuasaan dan yang liyan. Kebenaran tergantung dan berubah-ubah pada konteks tempat dan waktu tertentu, dimanapun dan kapanpun. Kebenaran diproduksi sebagai hasil manifestasi pengetahuan, sedangkan pengetahuan diproduksi sebagai hasil manifestasi bahasa. Manusia menstrukturkan realitas melalui bahasa. Sehingga, ide sentral dari karya *The Order of Things* yaitu pengetahuan adalah alat kekuasaan dan bahasa adalah konstruksi masyarakat sebagai representasi terhadap realitas.

Dalam karya *Archaeology of Knowledge*, Foucault tertarik untuk menyelidiki berbagai peristiwa diskursif, pernyataan-pernyataan yang dibicarakan dan dituliskan berupa teks. Ia menolak subjek sebagai pusat pemikiran yang membentuk dasar diskursus sains, khususnya ilmu manusia (Ritzer, 2004:67; Wiradnyana, 2018). Foucault memusatkan perhatiannya pada penyelidikan sejarah pengetahuan sebagai sebuah *episteme*, yaitu suatu bentuk pengetahuan otoritatif pada masa tertentu. Bagaimana bentuk pengetahuan didasarkan pada konsep-konsep dan pernyataan yang terorganisasi dan terlegitimasi dalam menjelaskan sesuatu. Pembentukan struktur pengetahuan tersebut mempengaruhi bagaimana cara praktik sosial individu, yang meliputi cara berpikir, berbicara dan bertindak dalam rezim pengetahuan.

Menurut pandangan Foucault, struktur pengetahuan sebagai formasi wacana yang dari masa ke masa mengalami pergeseran dalam bentuk

pengetahuan lain yang otoritatif sebagai rezim wacana. Arkeologi digunakan untuk menangkap *episteme* sebagai bentuk pengetahuan yang telah memperoleh pemaknaan terhadap situasi dan jaman tertentu yang disebut sebagai disposisi pengetahuan yang khas. Hal tersebut melibatkan operasi kekuasaan atas pertarungan pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan awam. Pemantapan pengetahuan berlangsung pada level wacana/diskursus. Arkeologi oleh Foucault digunakan untuk mengidentifikasi retakan zaman berdasarkan *episteme*, yang tidak hanya sebagai suatu cara pandang dalam melihat pemisahan antara yang benar dan salah, tetapi juga memisahkan ranah praktis antara apa yang mungkin dipikirkan atau dilakukan dengan pengetahuan yang ilmiah dari suatu masa. Terjadinya perubahan rezim pengetahuan tersebut memiliki keterkaitan dengan operasi kekuasaan, atau dengan kata lain rezim wacana merupakan bentuk dari kekuasaan (Mudhoffir, 2013: 80-81).

Selanjutnya, dalam karya Foucault yang berjudul *Discipline and Punish* melihat relasi kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Tidak ada hubungan kekuasaan tanpa ilmu pengetahuan, begitupun sebaliknya tidak ada hubungan ilmu pengetahuan tanpa hubungan kekuasaan (Ritzer, 2004:94; Wiradnyana, 2018). Dalam dunia modern, relasi kekuasaan dan pengetahuan berimplikasi pada pendisiplinan tubuh sebagai bentuk kontrol sosial. Foucault menjelaskan bentuk kekuasaan sebagai *disciplinary power* yang beroperasi melalui pendisiplinan tubuh. Metode yang digunakan dalam penyelidikan ini bukan arkeologi lagi, tetapi genealogi untuk menyelidiki karakteristik relasi kekuasaan. Pada karya ini, Foucault berfokus pada aspek relasi dan praktik yang bersifat non-diskursif, yaitu pada insituisi sosial dan praktik sosial. Foucault menjelaskan bahwa ada pergeseran bentuk penghukuman yang lebih modern yaitu penjara, dengan fokus pada penundukkan terhadap tubuh sebagai objek pengetahuan (Mudhoffir, 2013:83-84). Sehingga, Foucault menempatkan perhatian terhadap pengawasan yang membuat seseorang patuh pada hukum tertentu sebagai upaya pendisiplinan terhadap tubuh manusia atau apa yang disebut dengan

panoptikon, sebuah konsep bangunan yang berbentuk melingkar yang dapat mengamati dan mengawasi semua perilaku tahanan dari menara sentral (Sarup, 2008:102-104; Wiradnyana, 2018).

Dengan demikian, terdapat dua ide inti metodologi Foucault, yaitu arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaan. Alan Sheriden berpendapat bahwa arkeologi pengetahuan memuat upaya penelitian yang bertujuan untuk menelusuri seperangkat aturan atau sistem umum dari formasi dan transformasi pernyataan (formasi diskursif). Arkeologi yang digunakan Foucault mengorganisasikan dokumen tertulis dan pembicaraan, membagi dan mengaturnya dalam berbagai tingkatan, mengurutkannya, membedakan antara relevansi, menemukan elemen, mendefinisikan kesatuan, dan mendeskripsikan relasi yang kemudian akan dianalisis dan diinterpretasikan secara lebih mendalam (Ritzer & Goodman, 2004: 611; Wiradnyana, 2018). Menurut Foucault pengetahuan dan kekuasaan yang memiliki keterkaitan, genealogi berfokus pada hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan dalam berbagai ilmu kemanusiaan serta praktiknya yang berhubungan dengan pengaturan tubuh, perilaku dan pembentukan diri. Secara spesifik arkeologi menjalankan analisis empiris terhadap diskursus sejarah, dan genealogi menjalankan analisis kritis terhadap diskursus historis serta hubungannya dengan isu kontemporer (Wiradyana, 2018: 26-28).

1.5.3 Bahasa dan Diskursus Gender

Metode arkeologi yang dikembangkan oleh Foucault dari strukturalis Prancis (*Anales School*) menjelaskan tentang sistem sosial dengan analogi sistem bahasa. Sehingga sistem sosial dilihat sebagai tanda, yang memiliki makna dan disebut sebagai arbiter, tergantung pada penggunaan tanda lain. Arkeologi pengetahuan yang digunakan untuk menelusuri sistem pemikiran pada peristiwa historis yang disebut sebagai diskursus (Satvikadewi, 2014: 22). Praktik diskursif yang dipandang oleh Foucault sebagai bangunan seperangkat aturan yang memiliki keterkaitan dengan

waktu dan tempat pada periode tertentu yang didalamnya meliputi area sosial, ekonomi, geografi atau linguistik tertentu (Zoerni, 2012:214; Wiradnyana, 2018). Foucault berpendapat bahwa setiap periode dalam ranah domain tertentu terdapat kendala besar yang meliputi tata bahasa dan logika, hal ini mencerminkan bagaimana cara orang dalam berpikir. Mengecualikan formulasi tertentu dalam percakapan memuat kesalahpahaman sebagai kendala formal tata bahasa dan logika, serta omong kosong atau pernyataan yang tidak logis tidak termasuk dalam kendala formal. Kerangka kerja yang abstrak mempengaruhi pemikiran yaitu *episteme*.

Pada setiap periode tertentu memiliki *episteme* tersendiri, masing-masing periode satu dengan yang lain dapat terjadi perubahan *episteme*, hal tersebut menciptakan diskontinuitas dalam kebudayaan yang kemudian berkembang dalam struktur diskursif. Sehingga transisi satu periode ke periode yang lain, tidak dapat lagi dideskripsikan, diklasifikasikan dan diketahui dengan cara yang sama (Zoerni, 2012:52-54; Wiradnyana, 2018). Wacana bersifat diskursif dan sejarah bersifat diskontinu, tidak berkesinambungan. Dalam konteks tersebut, Foucault memaparkan tiga pengertian diskursus (Foucault, 2012; Satvikadewi, 2014: 23-24), yaitu :

1. Diskursus sebagai bahasa, yaitu domain pernyataan umum seperti ucapan dan teks yang memiliki arti serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Diskursus sebagai bahasa digunakan menjadi medium ekspresi dan representasi dari pemikiran yang lebih mendalam.
2. Diskursus merupakan sekumpulan pernyataan yang dapat diindividualisasikan, yaitu diperlakukan sebagai psikologi individual.
3. Diskursus sebagai praktik yang teratur dan mengungkapkan sejumlah pernyataan, yang diperlakukan guna menjadi tambahan pemikiran pada operasi yang dilakukan diskursus sebelumnya.

Foucault menjelaskan eksistensi dalam diskursus dipengaruhi oleh faktor eksternal yang meliputi peran masyarakat dalam melakukan kontrol pada diskursus, diantaranya: larangan, perbedaan dan penolakan. Faktor internal yang menunjukkan kontrol diskursus terhadap dirinya, meliputi: komentar, pengarang, disiplin akademis, dan penghalusan (Satvikadewi, 2014: 24).

Diskursus/wacana merupakan konsepsi yang dimaknai sebagai kata-kata, dibentuk oleh sekelompok tanda-tanda, pernyataan dan dimaknai sebagai realitas yang parsial serta menunjukkan perilaku yang didasarkan pada bentuk pengetahuan tertentu seperti wacana medis, wacana agama, wacana gender, dll (Jones, 2010:248; Wiradnyana, 2018). Wacana merupakan hasil dari dominasi sistem kekuasaan yang terbentuk melalui pengorganisasian kekuasaan/pengetahuan lembaga yang beragam termasuk lembaga keluarga (Goldstein, 2005:43; Wiradnyana, 2018). Menurut Foucault wacana merupakan praktik yang diprakarsai oleh penulis tunggal atau sekelompok pernyataan yang memiliki kesamaan formasi diskursif. Formasi diskursif ini meliputi laporan pada objek yang sama, diucapkan dengan cara yang sama, berbagi sistem umum konseptualisasi dan memiliki subjek yang sama (Foucault, 1972; Wiradnyana, 2018: 39-40).

Tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan kata, kalimat atau proposisi, tetapi diskursus juga memproduksi gagasan dan konsep. Wacana dapat ditelusuri secara sistematis tentang ide, opini, konsep dan pandangan hidup yang dibentuk dalam konteks tertentu yang mempengaruhi cara individu berpikir dan bertindak dalam masyarakat. Diskursus menghasilkan pengetahuan beserta praktik sosial yang membentuk subjektivitas. Ada relasi kekuasaan dibalik pengetahuan dalam praktik sosial dan semua aspek tersebut saling berkaitan (Foucault, 2012:65; Foucault, 2009:9; Wiradnyana, 2018).

Pada pasca modern, Foucault memandang kebenaran sebagai konstruksi yang dapat diubah sesuai dengan interpretasi manusia atas kekuasaan dan apa yang dianggap liyan. Kebenaran merupakan hasil

manifestasi pengetahuan sebagai hasil dari manifestasi bahasa. Foucault berpendapat bahwa bahasa merupakan produk struktur yang diproduksi oleh individu, melalui proses penerimaan bahasa dan interpretasi secara simbolik maupun praktis. Foucault beranggapan melalui diskursus pengetahuan manusia akan menentukan yang benar dan yang salah, sehingga yang benar dapat diterima sebagai kebenaran. Sehingga kebenaran merupakan hasil dari konstruksi kekuasaan. Kekuasaan dalam perspektif Foucault yang beroperasi secara berkelanjutan membuat kebenaran yang mendefinisikan tubuh, bagaimana cara bertindak dan mendikte perilaku manusia. Demikian kekuasaan melibatkan pembentukan subjektivitas individu (Satvikadewi, 2014: 32).

Arkeologi pengetahuan dimaksudkan untuk memunculkan perbedaan melalui proses pengungkapan. Bahasa menjadi alat yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam diskursus. Hal yang menjadi titik sentral yaitu siapa yang mengungkapkan pernyataan, bahasa yang digunakan dan penilaian subjek terhadap kebenaran (Satvikadewi, 2014). Dalam perspektif Foucault tentang kebenaran memiliki sifat yang labil/tidak pasti, sehingga kebenaran tergantung pada subjektivitas pembaca/pendengar/penerima pesan. Kebenaran perlu ditelusuri bagaimana pernyataan muncul ke permukaan daripada yang lain dan memiliki fungsi seperti apa. Demikian bahasa dapat menjadi representasi realitas (Foucault, 1972: 134).

Representasi merupakan tindakan diluar konteks, ada hal lain diluar diri individu melalui penggunaan tanda atau simbol. Tanda memiliki makna dan terbagi menjadi dua unsur. Diantaranya penanda/bentuk (*signifier*) merupakan citra yang ditangkap oleh pancaindera manusia dalam proses komunikasi dan diserap kognisinya, sedangkan petanda/makna (*signified*) merupakan konsep yang berkaitan dengan penanda dalam makna bahasa. Misalnya, warna hitam sebagai penanda yang merepresentasikan kehidupan sebagai petanda (Santoso, 2007: 112). Wacana menjadi representasi realitas, dimana bahasa tidak dipahami secara objektif. Tergantung kepada subjektivitas individu yang memahaminya melalui beragam sudut pandang

yang berbeda. Sehingga konstruksi bahasa tidak menggambarkan realitas secara jelas dan netral (Cavallaro, 2001:70; Santoso, 2007).

Bahasa harus dipahami melalui transformasi wacana agar dapat diperoleh makna dalam pernyataan. Bahasa memproduksi pengetahuan untuk mendefinisikan objek pengetahuan secara bermakna. Dalam ranah praktis, wacana digunakan untuk mengatur perilaku individu (Santoso, 2007:113). Bahasa seksis memiliki keterkaitan dengan wacana gender sebagai konstruksi sosial dan budaya. Perbedaan karakteristik yang menggambarkan sikap dan perilaku antara perempuan dan laki-laki merupakan produk dari konstruksi budaya yang dipahami oleh masyarakat (Brannon, 2005:15; Jatiningsih, 2017). Wacana gender diproduksi dengan muatan status, peran dan relasi antara perempuan dan laki-laki. Foucault memandang seksualitas menjadi persoalan gender dipahami sebagai konstruksi historis daripada pengalaman alamiah (Gillchrist, 1999:147-148; Jatiningsih, 2017).

Dalam relasi gender terjadi kontestasi wacana, dimana selalu ada wacana yang dominan dan mengontrol kebenaran. Wacana dominan semakin memperoleh legitimasi, ketika kebenaran dapat membentuk cara individu dalam berpikir dan bertindak. Demikian, bahasa seksis sebagai representasi wacana gender memproduksi kebenaran yang bias gender, merefleksikan posisi perempuan dan laki-laki secara tidak seimbang. Bahasa seksis dapat memunculkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki di masyarakat (Jatiningsih, 2017: 71). Wareing mendefinisikan bahasa seksis sebagai bahasa yang merepresentasikan laki-laki dan perempuan secara tidak setara. Salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah derajat kemanusiaannya dan memiliki hak-hak yang terbatas, daripada jenis kelamin yang lain. Bahasa seksis menggambarkan adanya stereotip gender yang dikonstruksi oleh masyarakat. Hal tersebut dapat merugikan perempuan dan laki-laki, namun lebih sering merugikan perempuan (Thomas & Wareing, 2007:106).

Parks dan Robertson (1998: 455) juga berpendapat bahwa, “*sexist language includes words, phrases, and expressions that unnecessarily differentiate between women and men or exclude, trivialize, or diminish either gender*”. Dalam hal ini, dapat dikatakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam penggunaan bahasa tidak setara, praktik bahasa seksis seringkali merugikan perempuan karena memposisikan perempuan pada posisi inferior. Ivy dan Backlund (1994: 72) menuliskan, “*if sexism refer to attitudes and/or behaviours that denigrate one sex to exaltation of the other, then it follows that sexist language would be verbal communication that conveys those attitudes or behaviours.*” Bahasa seksis merupakan representasi dari seksisme sebagai paham yang merujuk pada perilaku dan kebiasaan yang merendahkan satu jenis kelamin tertentu terhadap yang lain. Bahasa seksis diwujudkan melalui komunikasi verbal termasuk kata-kata, ungkapan, dan pernyataan yang memisahkan perempuan dan laki-laki, menunjukkan perilaku atau kebiasaan.

Praktik seksis memiliki keterkaitan dengan tatanan bahasa yang bias gender secara terstruktur. Konsep gender dalam masyarakat yang dikonstruksi secara kultural memunculkan perbedaan peran dalam relasi gender (Andriana, 2012). Foucault menjelaskan rezim gender menganalisis tentang bagaimana gender dikonstruksi, dinarasikan, distrukturkan, dipraktikkan dan dikontrol. Wacana gender memproduksi kebenaran melalui penciptaan nilai-nilai kepatutan sebagai ekspresi yang merumuskan relasi gender sesuai dengan harapan sosial yang ada di masyarakat, dan membatasi cara pandang tentang konsep kesetaraan gender (Jatiningsih, 2017). Menurut Walby wacana gender yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan, dan cenderung mengeksploitasi perempuan memiliki keterkaitan dengan sistem nilai patriarki (Walby, 2014). Judith Bennert menilai patriarki sebagai konstruksi yang dapat diubah tergantung pada lokus dan fokus tertentu. Dimana konstruksi tersebut berhubungan dengan kontestasi kekuasaan dan tidak bersifat objektif/biologis (Candraningrum, 2014).

Beberapa konsep yang dapat dijadikan kerangka berpikir untuk menjelaskan wacana kesetaraan dan ketidakadilan gender (Jatiningsih, 2017:82-83), yaitu : **Pertama**, Alienasi yaitu perlakuan yang terkait dengan eksistensi kelompok yang terdominasi, yakni perempuan sebagai liyan. **Kedua**, Dominasi yaitu bentuk penguasaan kelompok dominan terhadap kelompok tertindas dan tampak dalam marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan ketidak sukarelaan. **Ketiga**, Eksploitasi yaitu relasi antar individu atau kelompok yang mana satu individu atau satu kelompok secara struktural dalam posisi yang memungkinkannya mengambil keuntungan dari kelompok lain. **Keempat**, Ketidakadilan gender yaitu bentuk-bentuk ketidaknyamanan atau kesenjangan yang dialami oleh kelompok tertindas (terutama perempuan) sebagai akibat dominasi kelompok yang berkuasa. **Kelima**, Intersubjektivitas yaitu relasi antar individu yang diwarnai oleh nilai-nilai gender.

Foucault mengungkapkan kebenaran konsep patriarki dirumuskan secara maskulin, dimana nilai-nilai tersebut mendominasi relasi antara laki-laki dan perempuan. Paham patriarki menjadi wacana dominan yang melakukan kontrol terhadap cara individu dalam berpikir dan bertindak, sesuai dengan harapan yang berkembang di masyarakat yang terwujud dalam berbagai bentuk (Jatiningsih, 2017). Foucault menggambarkan perempuan sebagai minoritas seksual dengan sebutan *docile body*, yaitu tubuh yang dijinakkan melalui proses pendisiplinan atas nama peradaban. Peran perempuan didomestifikasi karena dianggap sebagai manusia kelas kedua. Tidak hanya penggambaran secara biologis, tetapi juga penindasan sistem yang lebih jauh lagi yaitu oleh kapitalisme ketika peran perempuan mengalami evolusi dari privat menuju publik. Peluang peran perempuan di ruang publik tidak menjamin secara penuh untuk menghapuskan adanya diskriminasi gender. Sebab di era modern, diskriminasi terjadi secara *subtle* dan mengeksploitasi ketidaksadaran individu. Kapitalisme menggambarkan perempuan dan laki-laki ideal secara visual dengan berbagai standar yang bias. Seperti kulit putih, tubuh langsing, rambut lurus bagi perempuan,

kemudian tubuh yang kekar dan berotot, bersih dan rapi bagi laki-laki. Proses internalisasi standar tersebut digunakan oleh masyarakat untuk mendisiplinkan tubuh individu dan memiliki nilai ekonomis bagi sistem kapitalis. Sistem kapitalis menjadikan perempuan sebagai sapi perah yang menguntungkan, artinya sebagai pekerja dengan upah murah dan atap kaca yang tak pernah pecah (*never shattered glass-ceiling*) (Candraningrum, 2014).

Dalam tafsiran Butler, Foucault berpendapat bahwa operasi normalisasi tubuh sebagai upaya korektif dalam disiplin kekuasaan. Penundukkan tubuh individu memenjarakan kebebasan dan menjadi titik subordinat dalam relasi kekuasaan. Selalu ada resistensi dalam operasi kekuasaan, sebagai upaya perlawanan atas konstruksi identitas. Foucault memandang identitas diproduksi melalui aturan nilai dan norma budaya dalam jaringan disiplin. Butler menambahkan bahwa identitas gender dilahirkan melalui tindakan yang dibentuk secara berulang dalam kerangka aturan yang kaku (Butler, 1990:33; Candraningrum, 2014).

Foucault mengungkapkan bagaimana hubungan resistensi terhadap kekuasaan, sama halnya dengan pendapat Brown (1995:37) bahwa “melalui operasi struktur perlawanan perempuan meliputi kebenaran (tidak dapat berubah atau disangkal) atas politik (fluktuasi, konteks, ketidakstabilan); penemuan (ilmu) atas keputusan (penilaian); untuk memisahkan hak yang ditetapkan atas kemajemukan argumentasi perempuan sendiri” (Candraningrum, 2014). Brown menambahkan untuk menyerukan perlawanan dilengkapi dengan praktik politik bertujuan untuk menumbuhkan ruang politik sebagai tempat berproses dan mempertanyakan norma-norma politik yang telah mapan untuk perempuan (Brown, 1995:49; Candraningrum, 2014). Ruang politik memiliki fungsi untuk memberikan perempuan edukasi agar dapat memiliki percakapan di ruang publik. Dibutuhkan kesadaran kritis dari perempuan untuk peka terhadap adanya ketidakadilan gender. Tujuannya untuk membongkar relasi kuasa antara dirinya dengan pengalaman patriarki yang telah dialaminya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Perspektif dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis analisis wacana kritis. Menurut Denzin dan Lincoln (2007:5), “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.” (Jatiningsih, 2017). Analisis wacana kritis menentukan keberpihakan yang bersifat subjektif untuk penciptaan kehidupan yang lebih baik. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan kritik terhadap ketimpangan hubungan sosial agar bertransformasi menuju hubungan yang setara (Eriyanto, 2001). Analisis wacana kritis digunakan untuk mengungkap praktik kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan yang direproduksi melalui praktik bahasa dalam konteks sosial tertentu (Jatiningsih, 2017).

Analisis wacana kritis tidak hanya melakukan kajian dalam unsur kebahasaan, tetapi juga menganalisa tentang konteks bahasa. Konteks berarti tujuan dan praktik tertentu yang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan (Eriyanto, 2001). Analisis wacana kritis menurut Fairclough dan Wodak menempatkan wacana sebagai praktik sosial, yang menggambarkan hubungan yang dialektis antara peristiwa diskursif dengan situasi, institusi, dan struktur sosial. Wacana dapat menunjukkan praktik dalam kontestasi kekuasaan yang memproduksi hubungan yang tidak seimbang. Seperti sikap yang rasial dan seksis yang dianggap sebagai kewajaran menurut sistem nilai budaya yang melingkupinya (Fairclough & Wodak, 1997:258; Eriyanto, 2001:7). Menurut berbagai tulisan dari Teun A. Van Dijk, Fairclough, dan Wodak (1997) menguraikan beberapa karakteristik dalam analisis wacana kritis, yaitu tindakan melihat wacana tidak terlepas dari tindakan yang dikontrol secara sadar, konteks mempertimbangkan latar; situasi; peristiwa dan kondisi historis memahami wacana tidak terlepas dari konteks tertentu, kekuasaan yang memahami wacana sebagai hasil produksi dari pertarungan

kekuasaan, dan ideologi yang melihat wacana selalu mencerminkan praktik ideologi tertentu (Eriyanto, 2001:8-13).

Analisis wacana kritis bersifat interpretatif dan eksplanatif, yaitu menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian itu terjadi dan secara mendalam memperoleh gambaran mengenai sebab akibat melalui pendekatan genealogi. Kajian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan genealogi kekuasaan oleh Michel Foucault. Ia menjelaskan bahwa metodologi arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaan dapat ditafsirkan secara luas sebagai metode kualitatif yang menggunakan teks dan percakapan sebagai data. Dalam penelitian ini analisis wacana kritis mengkaji tentang nilai-nilai yang digunakan untuk menundukkan/mendisiplinkan individu. Ataupun nilai-nilai yang membuat individu melakukan resistensi/perlawanan terhadap wacana dominan yang sedang berkembang.

1.6.2 Setting Sosial Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu ruang pelayanan publik di Gedung Siola, Surabaya. Ruang pelayanan publik ini biasanya disebut oleh masyarakat Surabaya sebagai mal pelayanan publik. Gedung Siola merupakan ruang pelayanan publik yang tergolong dalam penyediaan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mengurus keperluan masyarakat. Seperti kependudukan, akta, satlantas, museum, unit pelayanan terpadu satu atap, dan menjadi pusat beberapa kantor kedinasan di Surabaya. Peneliti berfokus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya sebagai lokus penelitian tentang praktik seksis di pelayanan publik. Peneliti memilih Dispendukcapil sebagai instansi pelayanan publik dalam lokus penelitian ini, karena melalui hasil observasi peneliti menemukan praktik seksis yang dilakukan oleh pekerja pelayanan publik. Hal tersebut dapat berimplikasi pada pandangan masyarakat terhadap citra pelayanan publik. Pekerja mengungkapkan bahwa sudah menjadi hal yang biasa ketika ada masyarakat yang meluapkan

amarahnya kepada pekerja, sebab masyarakat memiliki kepentingan tertentu yang harus dipenuhi. Kepala bagian selalu memberikan motivasi kepada pekerja agar selalu sabar, ikhlas, dan selalu tersenyum ketika melayani masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan tata kelola pelayanan publik yang memuaskan bagi masyarakat. Ketika tercipta tata kelola pemerintahan yang berkualitas maka dapat berimplikasi pada peluang investasi daerah. Tak dapat dipungkiri bahwa kebijakan Pemerintah Kota Surabaya berpihak kepada masyarakat, namun luput dalam memandang pekerja juga bagian dari masyarakat Surabaya. Hal ini menjadi tekanan yang dialami oleh pekerja untuk kerja cepat dan menciptakan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

Pekerja di ruang pelayanan publik menjalin interaksi dengan berbagai individu dari berbagai jenis kelamin, ras, etnis hingga kelas sosial. Pekerja harus menciptakan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, agar tercipta tata kelola pelayanan yang baik. Indikator tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan tercermin dalam proses interaksi yang memberikan respon timbal balik baik positif maupun negatif. Ketika ada interaksi maka secara bersamaan sedang terjalin relasi kekuasaan antar individu. Menurut pengamatan peneliti di Dispendukcapil, masyarakat memberikan gestur dan ungkapan yang menunjukkan ada rasa ketidakpuasan terhadap pelayanannya. Terwujud pada banyaknya pesan pengaduan yang masuk kepada Dispendukcapil tentang proses pelayanan yang tidak memiliki persyaratan yang pasti, membutuhkan waktu yang cukup lama hingga pelayanan pekerja yang dinilai tidak ramah terhadap pemohon. Dalam konteks ini, pemohon menjadi sebutan yang digunakan oleh pekerja merujuk pada masyarakat yang melakukan pelayanan di Dispendukcapil. Peneliti menemukan banyak pemohon yang memberikan kritik terhadap pelayanan Dispendukcapil Surabaya melalui pengaduan, koran lokal, hingga adanya pengancaman dilaporkan kepada pengadilan yang ditujukan kepada pekerja.

Pekerja memberikan respon dengan tidak cukup serius, karena mereka beranggapan sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar prosedur pelayanan. Pekerja menilai pemohon sebagai masyarakat yang terlalu dimanja oleh Wali Kota Surabaya, sehingga dinilai melakukan hal yang semena-mena kepada pekerja pelayanan publik. Pekerja mengaku bahwa dirinya merasa tertekan dengan situasi, di satu sisi pelayanan yang menggunakan teknologi membuat kesalahan yang terjadi diluar kendali pekerja. Namun, pekerja selalu menjadi pihak yang selalu disalahkan oleh masyarakat. Kemudian pekerja dituntut untuk melakukan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Ratusan pemohon setiap harinya membuat pekerja merasa tertekan dan perlu untuk mencari hiburan di sela-sela pekerjaan. Dalam praktiknya, pekerja melakukan praktik seksis melalui penggunaan bahasa yang bias gender. Pekerja tidak hanya melontarkan ungkapan secara verbal, tetapi juga menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Praktik seksis dilakukan oleh pekerja dan ditujukan kepada pekerja lain maupun pemohon sebagai upaya pendisiplinan. Hal tersebut dapat memunculkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di ruang publik. Kehadiran peran perempuan di ruang publik secara terus menerus diobjektifikasi dan didomestifikasi sebagai ekspresi nilai-nilai yang patriarki. Hal tersebut menjadi dasar ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik seksis di ruang pelayanan publik yang tercermin melalui penggunaan bahasa seksis. Adanya upaya penundukan dalam struktur otoritas pelayanan publik memungkinkan adanya pertarungan citra terhadap tata kelola pelayanan publik.

1.6.3 Metode Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *Snowball*. Dimana penentuan informan subjek dimulai dari informan yang sesuai dengan kriteria tertentu yaitu pekerja yang melakukan praktik bahasa seksis, yang dijadikan peneliti sebagai informan kunci sekaligus informan

subjek. Sebelumnya, peneliti pernah terlibat secara aktif mengamati informan penelitian selama periode magang satu bulan terhitung pada bulan Januari tahun 2018 di Dispendukcapil Surabaya yang menjadi bagian dari mal pelayanan publik. Dalam pengamatan peneliti, pekerja yang menjadi informan kunci melakukan praktik seksis dengan menggunakan ujaran/ungkapan yang bias gender yang ditujukan kepada pekerja lain dan pemohon.

Kemudian secara bertahap menjadikan pekerja lain sebagai informan subjek, karena memiliki relasi dengan informan kunci yang telah melakukan praktik seksis. Relasi dalam hal ini seperti intensitas interaksi yang termasuk sering karena sudah menjadi partner dalam bekerja. Dengan demikian, peneliti menentukan informan secara bertahap melalui relasi yang terjalin dengan informan kunci, hingga data yang didapat cukup dalam menggambarkan praktik seksis di Mal Pelayanan Publik. Kemudian informan non subjek dipilih atas pertimbangan kepemilikan wewenang dalam memberikan informasi terkait tugasnya yang secara tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang melakukan praktik seksis di Mal Pelayanan Publik. Informan non subjek tersebut seperti kesekretariatan, pengaduan, dan bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Akreditasi Kependudukan) atau berhubungan dengan server Dispendukcapil. Kemudian untuk data pendukung lainnya, peneliti juga menemui pemohon dengan metode *Accidental*. Pemohon ditemui secara acak yang sedang melakukan pelayanan untuk dimintai informasi perihal kualitas pelayanan. Pemohon tersebut akan dijadikan informan pendukung jika memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria informan pendukung tersebut yaitu masyarakat/pemohon yang sudah datang ke Dispendukcapil sebanyak dua kali dan pernah mengalami praktik seksis.

Dalam penelitian ini, para pekerja yang secara langsung melayani masyarakat ditentukan sebagai informan subjek sekaligus informan kunci, pekerja lain di bidang terkait dan pemohon sebagai informan pendukung atau non-subjek. Dalam penelitian kualitatif jumlah informan tidak bisa

ditentukan secara pasti karena memperhatikan kelengkapan dan kebutuhan data yang telah diperoleh. Maka dari itu, pencarian informan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

Dalam penelitian ini jumlah informan yang dimintai keterangan lebih lanjut dalam wawancara mendalam mencapai 6 orang pekerja, terbagi menjadi 4 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Kemudian ada 4 orang pekerja laki-laki dan 1 orang pemohon sebagai pendukung data penelitian. Tidak ada batasan jumlah informan yang menjadi dasar utama dalam proses pengumpulan data, tetapi atas pertimbangan variasi data yang dinilai cukup merefleksikan adanya praktik seksis di ruang pelayanan publik Surabaya. Demi menjaga kepercayaan informan dalam proses penelitian ini, maka nama informan dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan nama inisial. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai data informan dalam penelitian ini baik informan subjek maupun non subjek.

Tabel 1.1. Heterogenitas Informan Penelitian

NO	Nama Inisial	JK	Usia	Asal	Pendidikan	Jabatan	Kategori Informan
1	SA	P	24	Surabaya	S1	Staf Perekaman E-KTP	Subjek & Kunci
2	AS	P	19	Surabaya	SMK	Staf Informasi	Subjek
3	CO	P	23	Tuban	S1	Staf Informasi	Subjek
4	CG	L	28	Surabaya-Bali	S1	Staf Perekaman E-KTP	Subjek
5	HR	L	20	Sidoarjo	S1	Penyuluh Lapangan	Subjek
6	AP	P	27	Surabaya	S1	Staf Cetak E-KTP	Subjek
7	RS	L	33	Surabaya	S1	Staf Bidang PIAK	Non-Subjek
8	AD	L	29	Surabaya	S1	Staf Kesekretariatan	Non-Subjek

9	RY	L	25	Surabaya	S1	Staf Kesekretariat an	Non-Subjek
10	GT	L	25	Surabaya	D4	Pengaduan	Non-Subjek
11	AY	P	22	Surabaya	S1	Pemohon	Non-Subjek

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam, dan pengumpulan data sekunder. Observasi adalah suatu prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati dan mencatat perilaku dan pembicaraan subyek penelitian dengan menggunakan pedoman observasi. Observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipatoris, yang berarti peneliti mengambil peran sosial apapun dalam interaksi sosial yang diamati. Peneliti mengamati dan mendengar percakapan, selama observasi untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi serta apa yang tidak tampak dan tidak diungkapkan melalui *indepth interview* tanpa disadari oleh subyek penelitian.

Peneliti melakukan observasi kurang lebih selama satu bulan, sejak tanggal 8 Januari 2018 hingga 2 Februari 2018 di Dispendukcapil Surabaya, tepatnya berada di Siola yang disebut sebagai Mal Pelayanan Publik. Peneliti berperan sebagai mahasiswa yang sedang magang di Dispendukcapil Surabaya, sejak hari pertama peneliti ditempatkan oleh sekretaris Dispendukcapil di bagian loket A yaitu perekaman e-ktip. Peneliti bertugas untuk membantu dua orang pekerja di loket A dalam melakukan proses perekaman e-ktip. Dua orang pekerja tersebut menjadi informan dalam penelitian ini, antara lain SA dan AS yang keduanya berjenis kelamin perempuan. Setiap pagi sekitar pukul 07.00 WIB sebelum memulai pekerjaan, para pekerja melakukan apel pagi yang dipimpin oleh kepala bagian. Dalam apel tersebut memuat kata-kata motivasi dari kepala bagian

kepada pekerja untuk selalu bersyukur dalam bekerja, tersenyum ketika melakukan pelayanan, sabar dalam menghadapi pemohon, dan selalu bersemangat dalam bekerja. Terkadang dalam apel juga menjadi sarana untuk memberikan pemberitahuan kepada pekerja tentang perihal permasalahan pekerjaan.

Selama menjalani kegiatan magang, peneliti bertemu dan melayani banyak pemohon setiap harinya dengan berbagai macam karakter. Tak jarang peneliti juga bercakap-cakap dengan dua orang pekerja di loket A tersebut di sela-sela pekerjaan. Mulai dari membicarakan bagaimana proses penyelesaian masalah yang dialami pemohon, hal-hal diluar pekerjaan seperti perihal pribadi, hingga membicarakan pemohon sebagai bahan lelucon. Menurut pengamatan peneliti, pekerja mengobjektivikasi tubuh pemohon dan melakukan pendisiplinan kepada pemohon. Pemohon terkadang bercerita perihal pribadi mereka pada pekerja, banyak pula yang juga meminta saran kepada pekerja. Pernah pekerja memberikan komentar kepada pemohon laki-laki yang memiliki tato di wajahnya sambil memberikan pelayanan. AS salah satu pekerja bertanya alasan pemohon memiliki tato di wajah, kemudian AS memberikan kritik sekaligus saran kepada pemohon "*lanang iku yo sing rapi terus resik ngunu rek, saiki golek kerjoan angel e opo maneh lek tatoan ngene*" (laki-laki itu harus berpenampilan rapi dan bersih, saat ini mencari pekerjaan susah apalagi jika mempunyai tato). Tak hanya memberikan komentar kepada pemohon yang memiliki tato, tetapi juga kepada pemohon lain yang dianggap nyeleneh. Seperti berpakaian mini di ruang publik, riasan wajah yang digunakan oleh pemohon hingga berkomentar terhadap pemohon difabel, tunawisma yang dibawa oleh liponsos, hingga lansia yang dianggap pekerja membutuhkan waktu yang lama dalam pelayanan. Tak jarang pekerja juga melekatkan stigma yang buruk kepada pemohon yang berasal dari Madura. Pemohon yang memiliki identitas Madura dianggap memiliki kelas sosial rendah, dinilai oleh pekerja tentang cara berpakaian yang '*ndeso*' (kampungan) dan sikap yang selalu '*ngeyelan*' (membantah).

Setelah melakukan observasi peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada informan untuk mengetahui motif lebih dalam mengapa pekerja melakukan praktik seksis. Wawancara mendalam dapat diartikan sebagai salah satu jenis pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab, yang berhadapan langsung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan wawancara mendalam karena berfungsi untuk mengungkap informasi mengenai makna yang terkonstruksi dalam pemikiran informan. Selama melakukan wawancara, peneliti berpedoman pada pedoman penelitian yang telah disusun sehingga topik wawancara tidak melebar dan tetap dalam koridor fokus penelitian.

Selain menggunakan observasi dan wawancara mendalam dalam proses pengumpulan data, peneliti juga mengumpulkan data sekunder untuk mendukung proses analisis wacana. Data sekunder digunakan untuk memperkaya data, dan melengkapi data primer yang didapatkan melalui proses wawancara mendalam dan hasil observasi. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang diambil melalui website Pemerintah, peraturan konstitusional, artikel/berita, termasuk review berbagai literatur.

1.6.5 Metode Analisis Data

Sesuai dengan model siklus tahapan penelitian kualitatif yang diutarakan Wallace (1973), setelah melakukan observasi lapangan, peneliti menganalisis data yang telah didapat dengan tiga tahap yaitu *scalling measurement*, *empirical generalization* dan *logical induction*. Setelah data dianggap lengkap untuk menjawab fokus masalah penelitian, maka peneliti melakukan *scalling measurement*. Pada tahap ini peneliti mentranskrip atau mengurai dalam bentuk tulisan mengenai “*apa yang peneliti lihat dan dengar*” baik secara langsung maupun dari hasil rekaman, khususnya menjadikan percakapan *indepth interview* dalam bentuk tulisan. Pada transkrip, peneliti mencatat apa adanya sesuai diksi atau bahasa yang

diucapkan oleh informan. Setelah itu, peneliti melakukan kategorisasi data berupa proses file atau mengkategorikan data hasil penelitian berdasarkan waktu penelitian.

Tahap kedua, peneliti melakukan *empirical generalization* berupa menganalisis transkrip dengan cara meng*highlight* makna dominan dalam transkrip, termasuk makna yang “tersembunyi” yang terkandung dalam teks. Kemudian peneliti mengaitkan kutipan dan menekankan *keyword* dengan praktik bahasa seksis dalam relasi kuasa di ruang pelayanan publik. Terakhir, peneliti melakukan *logical induction* dan menyusun kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Menurut Lawrence Newman (2000) yang dikutip oleh Eriyanto menjelaskan bahwa penelitian kritis tidak dapat dihindarkan dengan unsur subjektivitas. Selama memberikan penafsiran terhadap teks, pengalaman dan latar belakang peneliti, pendidikan, afiliasi politik bahkan keberpihakan dapat mempengaruhi hasil interpretasi pada temuan data (Eriyanto, 2001:62). Demikian penafsiran peneliti secara subjektif yang dibangun dengan dasar pijkan penalaran dan kerangka pemikiran yang kuat, dapat menutup kemungkinan adanya hasil interpretasi lain. Analisis wacana kritis yang pada dasarnya digunakan pada penelitian interpretatif, maka untuk menghindari hal-hal yang bersifat politis perlu dilakukan triangulasi data yang mengelaborasi data yang sudah dikumpulkan seperti hasil observasi, wawancara mendalam, dan data sekunder lainnya (Jatiningsih, 2017).